

ABSTRAK

ABDURRAHMAN, 105261109920, 2024. Skripsi dengan judul Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad Menurut Fikih Islam Dan KHI. Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. **Pembimbing (1) : Mukhlis Bakri., (2): Nur Asia Hamzah.**

Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan untuk mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak-hak dan kewajiban setiap pasangan. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kedudukan perjanjian ini dalam hukum Islam dan positif. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, mengandalkan teori, konsep pemikiran, dan ide. Hasil analisis menunjukkan perjanjian pernikahan dibuat secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak, yang mengakibatkan keduanya terikat pada perjanjian tersebut dan wajib mematuhi. Sebagai perjanjian, pelanggaran oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang khusus mengatur perjanjian perkawinan untuk penggunaan nasional di Indonesia. Calon suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan diharapkan memahami signifikansi keberadaannya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada periode pengumpulan data dan setelahnya, dengan menyusun dan mendisplay data dari berbagai buku dan kitab untuk verifikasi dan kesimpulan. Tahapannya meliputi: pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan, pencocokan data yang telah dikumpulkan, penjelasan asal sumber data, dan analisis menyeluruh serta pengecekan ulang data untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan tidak diwajibkan secara mutlak, namun jika dibuat, harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, seperti wanprestasi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, dapat menjadi dasar bagi istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dengan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran yang jelas dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian.

Kata kunci: Perjanjian Pernikahan, Hukum Pelanggaran Perjanjian

ABSTRACT

ABDURRAHMAN, 105261109920, 2024. Thesis entitled Marriage Law with Violation of Covenants Outside the Akad According to Islamic Jurisprudence and KHI. Thesis, Ahwal Syakhsiyyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. **Supervisor (1) : Mukhlis Bakri., (2): Nur Asia Hamzah.**

A marriage agreement is an agreement made before the wedding takes place to bind both parties. This agreement governs the rights and obligations of each spouse. This study discusses the implementation and position of this agreement in Islamic and positive law. Research uses the literature method, relying on theories, thought concepts, and ideas. The results of the analysis showed that the marriage agreement was made in writing with the consent of both parties, which resulted in both being bound by the agreement and obliged to abide by it. As an agreement, breach by either party may result in a lawsuit for divorce or damages. Therefore, special regulations governing marriage agreements for national use in Indonesia are needed. The prospective husband and wife before making a marriage agreement are expected to understand the significance of its existence.

Data analysis in this study was carried out qualitatively in the data collection period and after, by compiling and displaying data from various books and books for verification and conclusion. The stages include: collection of data relevant to the discussion, matching the data that has been collected, explanation of the origin of data sources, and thorough analysis and re-checking of data to obtain conclusions and a complete picture related to the object of research.

The results showed that in Islamic law, the marriage agreement is not absolutely obligatory, but if made, must be in accordance with the provisions of the Shari'a and not contradict Islamic principles; Violation of the agreement, such as default or non-fulfillment of agreed conditions, can be a basis for the wife to request the annulment of marriage or as a reason in a divorce lawsuit in the Religious Court, with the annulment of the marriage agreement can be carried out if there is a clear violation and cannot be fulfilled by the party who violated the agreement.

Keywords: Marriage Agreement, Law of Breach of Agreement